



14

Membangun Kedaulatan Pertanian :

Perspektif Alternatif untuk Mewujudkan Daya Saing Berkelanjutan

Prof. Dr. H. Maman Haeruman Karmana, Ir, M.Sc.

Haeruman
LIES

Prof. Dr. Maman Haeruman K., Ir., MSc

MEMBANGUN KEDAULATAN PERTANIAN:

**Perspektif Alternatif untuk Mewujudkan
Daya Saing Berkelanjutan**

**Program Studi Agribisnis
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Unpad**

ISBN:

**MEMBANGUN KEDAULATAN PERTANIAN:
Perspektif Alternatif untuk Mewujudkan Daya Saing
Berkelanjutan**

© 213 Maman Haeruman K.

Editor: Iwan Setiawa, SP., MSi

Cover: A.C. Trida Kusumah, SP., MP

**Hak cipta yang dilindungi ada pada penulis
Hak penerbitan ada pada Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian Fakultas Pertanian Unpad**

SAMBUTAN

KETUA JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Sudah sejak lama Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Padjadjaran memiliki tradisi yang kuat dalam hal pertukaran gagasan secara tertulis, baik melalui makalah, paper, artikel maupun buku. Pernyataan ini dapat diungkapkan untuk menunjukkan betapa dinamisnya kehidupan akademik di jurusan, selain tentu saja proses pertukaran itu terjadi melalui diskusi-diskusi antar staf pendidik di jurusan baik formal maupun informal. Sebagai ketua jurusan, ini adalah sambutan kesekian kali yang dapat saya sampaikan terkait dengan terbitnya buku yang ditulis oleh staf Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad, dan ini tentu sangat membanggakan.

Sebagai seorang peneliti, aktivis, sekaligus pelaku pembangunan pertanian yang diakui kepakarannya di dunia pertanian Indonesia, sejumlah buah pikiran Prof. Maman Haeruman Karmana dapat dibaca, dikaji dan dikritisi dalam buku berjudul "Membangun Kedaulatan Pertanian: Perspektif Alternatif untuk Mewujudkan Daya Saing Berkelanjutan" ini. Pengalaman berpuluh tahun bergelut dan berinteraksi dengan berbagai aktor dalam bidang pertanian, di Indonesia khususnya, menjanjikan kritis dan tajamnya analisis Prof. Maman terhadap berbagai isu pertanian baik yang telah terjadi di masa lalu, saat ini terjadi, dan prediksinya di masa depan.

Atas nama Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad, dengan sangat berbahagia saya menyambut terbitnya buku ini. Saya berharap semoga buku ini dapat menjadi salah satu referensi berharga dan bermutu bagi dunia pertanian, khususnya dalam bidang pembangunan pertanian di Indonesia.

Jatinangor, September 2013
Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad,
Deddy Ma'mun, Ir., MS.

SAMBUTAN

KETUA LABORATORIUM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan bagi kemakmuran hidup manusia berupa kekayaan alam yang berlimpah baik pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Semua bentuk kekayaan alam tersebut dengan ilmu pengetahuan dikembangkan dalam wujud pembangunan demi kesejahteraan manusia.

Perjalanan panjang pembangunan pertanian kita hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan dan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan petani dan kedaulatan sosial ekonomi bangsa. Potensi pertanian Indonesia yang besar pada kenyataannya belum mampu dikelola “secara mandiri” menjadi sandaran sebagian besar warga dan generasi bangsa. Padahal pembangunan pertanian semestinya menjadi inti (core) pembangunan nasional Indonesia.

Secara substantif, apa, siapa, mengapa, dimana dan bagaimana pembangunan pertanian kita agar lebih memihak pada petani kecil dan menjadi warna bagi terbangunnya kedaulatan bangsa, Prof. Dr. Maman H, Karmana, Ir., MSc telah mengupasnya secara detail dan mendalam di dalam buku ini. Intinya, bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pertanian [lebih dari sekedar kedaulatan pangan] Indonesia membutuhkan adanya sistem yang mensinergikan modal-modal potensial pembangunan pertanian.

Secara kelembagaan, kami sangat mengapresiasi terbitnya buku ini karena selain ditulis sesuai dengan bidangnya, buku ini juga layak untuk dijadikan sebagai referensi bagi para mahasiswa, peneliti dan praktisi maupun pengambil kebijakan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Maman H, Karmana, Ir., MSc dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembangunan pertanian Indonesia.

Jatinangor, 20 September 2013

Dr. Lies Sulistyowati, Ir., MS

PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan seluruh makhluknya. Melalui ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Qur'an Allah SWT mengabarkan secara berulang-ulang kepada kita tentang penting dan strategisnya pertanian dalam kehidupan, terutama untuk mewujudkan sebuah kemakmuran. Bahkan, dilengkapi juga dengan riwayat-riwayat yang menegaskan bahwa pertanian mampu menjadikan bangsa-bangsa [sepanjang sejarah] sukses membangun peradaban yang gemilang. Semua itu menegaskan bahwa membangun pertanian [yang berdaulat], masih dan akan tetap menjadi landasan sukses pembangunan sebuah bangsa.

Perlu digarisbawahi bahwa pertanian yang dimaksud bukan sekedar usahatani padi, bukan sekedar pangan, tetapi pertanian secara keseluruhan. Inilah yang mendasari pentingnya membangun kedaulatan pertanian. Dalam konteks kekinian, kedaulatan pertanian menjadi penting, menjadi keharusan untuk diwujudkan di Indonesia. Persoalannya, hampir semua sisi pertanian [pangan, perkebunan, peternakan, perikanan berikut agroindustri] berada pada kondisi yang tidak berdaulat. Tentu diperlukan kecermatan dan ketajaman dalam menganalisis ketidakberdaulatan tersebut. Analisis yang bukan sekedar tersedia atau tidaknya produk pertanian, berlimpah atau kurangnya produk pertanian, tetapi kedaulatan yang sampai pada area yang lebih luas, menyangkut pasarnya, penyediaan sarana produksinya, sumber modalnya, patennya, pelakunya, orientasinya dan nilai tambahnya.

Bagaimana tidak, Indonesia yang berlimpah hasil pertanian, seperti sawit [bahkan menjadi produsen sawit terbesar di dunia], teh, rumput laut, rotan, karet, kakao, ikan, kelapa dan sebagainya, ternyata tidak benar-benar berdaulat. Dikatakan demikian karena input, modal, pasar dan industri pengolahannya dikendalikan negara lain. Sawit dikuasai Singapura dan Malaysia, pasar teh dompleng kepada produsen Asia lainnya, rotan dompleng ke Australia, rumput laut dompleng Philipina dan sebagainya. Artinya, untuk produk yang berlimpah saja Indonesia tidak berdaulat, apalagi untuk komoditas yang telah lama diimpor [beras, gula, kedelai, daging dan sebagainya]. Secara industrial, Indonesia juga belum berdaulat dalam

pengolahan hasil pertanian. Faktanya, hambir sebagian besar ekspor produk pertanian kita masih berupa bahan mentah. Indonesia belum berdaulat dalam rantai nilai dan rantai pasok. Indonesia belum “terpercaya” untuk urusan peningkatan nilai tambah. Implikasinya, nilai terbesar dari produk pertanian dikuasai negara lain.

Secara sosial kelembagaan, Indonesia pun belum berdaulat, karena posisi tawar petani tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan korporasi. Korporasi agribisnis internasional yang tidak hanya dominan dalam menguasai benih, obat-obatan dan alat mesin pertanian, tetapi juga korporasi yang bergerak dalam pemasaran hasil (ekspor maupun impor), pengolahan hasil dan standarisasi. Ironinya, jangankan petani, BUMN Pertanian, Balai Benih, Pusat Penelitian dan Koperasi saja belum berdaulat. Produk inovatifnya tidak berdaya berhadapan dengan produk korporasi (TNCs). Perguruan tinggi yang dihuni oleh pakar-pakar juga terkooptasi cengkraman korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Alih-alih bebas dari dominasi korporasi, ketidakberdayaan para petani diperparah oleh kekuatan mafia.

Secara spasial, pedesaan yang dilabel secara struktural sebagai basis pertanian juga menampilkan kondisi yang bukan saja statis, tetapi menurun, baik secara sosial-budaya maupun ekologis. Pedesaan yang dominan, yang seharusnya menjadi pusat perhatian [karena menjadi penentu angka IPM regional maupun nasional], pada kenyataannya hanya dipandang sebagai ruang eksploitasi, ruang SDM murah, ruang SDA mentah, ruang produksi pertanian dan ruang tanpa berpenghuni. Secara keseluruhan pedesaan dibiarkan berjalan stagnan dan timpang dengan perkotaan. Aksesnya terus diupayakan untuk ditingkatkan, tetapi bukan untuk didinamiskan, melainkan untuk mempercepat proses eksploitasi dan masuknya orang luar. Kelembagaan pedesaan dibiarkan dikelola oleh SDM-SDM [maaf] yang asal-asalan, yang tidak bervisi pada upaya mengembangkan potensi lokalnya secara produktif, tetapi hanya melanjutkan eksploitasi dan menjadi perpanjangan tangan kekuatan-kekuatan luar atas desa.

Secara tekno-ekonomi, fisik-teknis maupun sosio-politik, ketidakberdaulatan pertanian juga tergambar dari terdesaknya produk lokal oleh produk impor [pada berbagai level pasar], terdesaknya lahan-lahan pertanian oleh peruntukkan lain [konversi lahan], terkurasnya sumberdaya mentah pedesaan oleh perkotaan, tersedotnya tenaga-tenaga muda pedesaan oleh perkotaan, terpolarisasinya anggaran pembangunan ke sektor non pertanian dan perkotaan, dan sebagainya. Pada level global, transaksi berjalan sektor pertanian semakin menjauh dari surplus. Pasar

produk pertanian semakin jernih. Alih-alih diperluas, yang ada pun rontok satu persatu tergusur dari persaingan, baik karena faktor involusi maupun tersisih oleh hadirnya pemain baru yang lebih kompetitif. Otonomi yang semula menjadi harapan bagi sektor pertanian, kini tinggal harapan. Alih-alih membaik, tatakelola dan kelembagaan pertanian kini terpolusi intrik-intrik politik.

Ketidakberdaulatan pertanian Indonesia juga terlihat jelas dari rendahnya pemihakan dan tingginya ketergantungan para konsumen [baca: warga bangsa] atas produk-produk impor. Atas nama kualitas, atas nama gengsi dan atas nama kelas, produk impor digandrungi secara melembaga dan diadopsi secara membabibuta oleh masyarakat kita. Sementara produk lokal yang "faktanya" tidak lebih menarik dibandingkan produk impor, dicitrakan secara massal untuk dipinggirkan. Upaya-upaya untuk mencintai dan menggunakan produk lokal memang dilakukan, tetapi "magnitud-nya" terkubur promosi korporasi. Tetapi perlu diketahui dan disadari oleh semua pihak bahwa faktornya bukan terletak pada hal-hal seperti itu, tetapi lebih sistematis, menyangkut perilaku yang terbangun sejak anak-anak, sejak sekolah dasar dan sejak dalam rumah tangga. Persoalan sejatinya adalah krisis identitas diri bangsa, krisis kemandirian bangsa, krisis harga diri bangsa, krisis perlindungan bangsa, krisis cinta tanah air dan bangsa.

Oleh karena itu, persoalan-persoalan [jika tidak disebut krisis] pertanian Indonesia sudah saatnya disikapi dengan upaya cerdas, bukan menggadaikan lahan kepada korporasi internasional [sebut saja investasi pangan], atau ramai-ramai investasi ke luar negeri [karena alasan komparatif], tetapi yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana korporasi nasional [BUMN], koperasi, komunitas, perguruan tinggi, pebisnis dan pemerintah memulai aksi yang benar-benar nyata untuk membangun kedaulatan pertanian. Memulai dengan meningkatkan proporsi sumberdaya manusia berkualitas di sektor pertanian dan pedesaan. Mulai dengan meregenerasi pelaku-pelaku pertanian [baik pada subsistem penyediaan input, usahatani, pelayanan, pengolahan hasil dan pemasaran] yang sebagian besar tua (*agieng agriculture*). Lahan-lahan guntai [yang sebagian besar milik orang-orang kota] yang digarap oleh para penyakap apa adanya sudah saatnya dikelola secara profesional. Sumberdaya alam yang berlimpah di pedesaan sudah saatnya untuk diolah dan ditingkatkan nilai tambahnya di pedesaan.

Produk-produk perkebunan, hasil hutan dan lautan yang berlimpah jangan lagi dibiarkan mengalir dalam bentuk produk mentah ke negara orang, tetapi tinggikan nilai tambahnya di dalam negeri. Tentu harus

ditangani oleh industri anak negeri [bukan korporasi asing], dan diintegrasikan dengan inovasi-inovasi yang juga dihasilkan oleh institusi penelitian dan pengembangan dalam negeri. Kepercayaan diri bangsa harus dibangkitkan dan diyakinkan [bahwa kita bisa], bahwa produk kita berdaya saing, bahwa produk kita adalah kebanggaan kita. Sejalan dengan itu, bangun juga kepercayaan diri, kepedulian dan optimisme bangsa yang menjadi konsumennya. Peran pemimpin, pendidik, pengelola media, komunitas dan keluarga harus dikedepankan.

Menutup diri dalam keniscayaan globalisasi jelas bukan solusi, siapapun pasti tidak menghendaki. Tetapi mari kita introspeksi, adakah negara maju yang membiarkan petani dan bangsanya dilindas “produk” negara orang? Jelas tidak ada. Tetapi subsidi dan proteksi yang kasar tidak lagi tepat untuk dilembagakan. Kecerdasan China dalam melindungi petani dan pelaku usaha bangsanya patut kita pelajari. Mereka tidak memproteksi dengan kebijakan tangan besi, tetapi “regulasi” yang mengharuskan [mewajibkan dan melembagakan] bangsanya untuk meningkatkan konsumsi atas produk bangsanya sendiri membuat mereka tahan dari terpaan krisis ekonomi dan guncangan pasar. Kalaupun tidak dapat menjaga titik tertinggi pertumbuhan ekonominya, dengan kebijakannya, ekonomi China masih tetap berdiri paling tinggi. Hal serupa juga diberlakukan Korea Selatan.

Secara ekologis, perubahan iklim memang menjadi tantangan. Tetapi tindakan yang harus dikedepankan adalah memperbaiki lingkungan yang nyata-nyata berdampak pada kegagalan pertanian. Tindakan-tindakan yang ramah lingkungan harus dibudayakan, tentu tidak sekedar label, tetapi melembaga dalam seluruh tatanan. Teknologi penting, tetapi bukan didesain untuk perang [datang menyerang, menghabisi lawan, lalu pulang dengan menjarah rampasan]. Ekologi menjadi penting untuk dilekatkan pada semua modal potensial pertanian. Nilai yang diharapkan adalah keberlanjutan, baik secara sosial, ekonomi, fisik-teknis, politik, ekologis dan kelembagaan.

Secara keseluruhan substansi-substansi sebagaimana dipaparkan dalam pragraf di atas diuraikan dengan detil dalam bab-bab buku ini. Bab I berisi tentang perekonomian petani dan kapitalisme di Indonesia. Sejatinnya, pembangunan pertanian telah mengalami perkembangan dari modus eksploitasi kepada pendekatan yang ramah lingkungan, yang tidak sekedar mengusung keberlanjutan, tetapi telah pula didorong pada gerak ekonomi hijau (Bab II). Mewujudkan pendekatan berkelanjutan dan ekonomi hijau seringkali mengalami distorsi. Persoalannya, implementasi keduanya tidak didasarkan pada suatu pemahaman yang mendasar, yang berakar dari

paradigma ramah lingkungan, paradigma berkelanjutan dan paradigma hijau yang sistemik dan holistik. Untuk itu, menjadi keharusan bagi semua pihak yang termaktub sebagai pelaku pembangunan pertanian untuk memahami secara mendalam paradigma pembangunan pertanian berkelanjutan dan paradigma berpikir sistem (Bab III).

Salah satu wujud konkrit dari paradigma berpikir sistem adalah mengintegrasikan dan mensinergikan modal-modal potensial pembangunan pertanian, baik modal ekonomi, modal teknologi, modal sosial, modal alami, modal fisik, modal institusi, modal politik dan modal ekologis (Bab IV-Bab XI). Secara spasial, modal-modal tersebut eksis dalam ruang perkotaan dan pedesaan, dalam ruang lokal maupun ruang global. Oleh karena itu, bagi perwujudan kedaulatan pertanian, diperlukan adanya upaya untuk mensinergikan modal-modal potensial. Tentu saja implementasinya tidak dapat dilakukan secara orang per orang, bagian per bagian, tetapi memerlukan keterlibatan total semua pihak.

Tentu saja buku ini masih jauh dari sempurna, bahkan [boleh jadi] masih jauh untuk menggambarkan sebuah strategi membangun kedaulatan pertanian. Namun, melalui gagasan-gagasan yang ditawarkan, minimal mendapat gambaran tentang realitas pembangunan pertanian di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, sehingga dapat tergugah dan menggugah untuk kemudian mengoreksi dan memperbaikinya kearah yang lebih berdaulat. Terlepas dari segala kekurangannya, penulis menyadari bahwa tersusunnya buku ini tidak terlepas dari partisipasi banyak pihak. Untuk itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tulisan yang tidak berujung pangkal ini dapat bermanfaat. Amiin.

Jatinangor, September 2013

Editor

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA JURUSAN.....	iii
SAMBUTAN KETUA LABORATORIUM.....	iv
PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PEREKONOMIAN PETANI DAN KAPITALISME DI INDONESIA.....	I
BAB II DINAMIKA PEMBANGUNAN PERTANIAN.....	13
BAB III PARADIGMA PEMBANGUNAN PERTANIAN.....	23
BAB IV PEMBANGUNAN MANUSIA [<i>HUMAN CAPITAL</i>] PERTANIAN.....	39
4.1 PEMBANGUNAN PERTANIAN: Tantangan Kemiskinan Pada Berbagai Ekosistem.....	41
4.2 KESENJANGAN TENAGA KERJA DAN KEMISKINAN.....	57
BAB V PEMBANGUNAN EKONOMI [<i>ECONOMIC CAPITAL</i>] PERTANIAN.....	67
5.1 REPOSISI PEREKONOMIAN JAWA BARAT BERBASIS POTENSI LOKAL.....	69
5.2 PRASYARAT PENUNJANG KETAHANAN PANGAN DI JAWA BARAT.....	77
5.3 SINERGITAS KEGIATAN PEMASARAN DAN PERDAGANGAN DI WILAYAH ON FARM DAN OFF FARM.....	81

	5.4	STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI JAWA BARAT.....	89
	5.5	MASALAH PERBERASAN DI JAWA BARAT.....	95
BAB VI		PEMBANGUNAN TEKNOLOGI PERTANIAN [<i>TECHNOLOGY CAPITAL</i>].....	101
	6.1	BEBERAPA PERTIMBANGAN SOSIAL EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DI INDONESIA.....	103
	6.2	PERKEMBANGAN PEMANFAATAN MEKANISASI PERTANIAN DI JAWA BARAT.....	113
BAB VII		PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA PERTANIAN [<i>SOCIAL CAPITAL</i>]	119
	7.1	DINAMIKA SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA KETENAGAKERJAAN PANEN DAN PASCAPANEN PADI SAWAH DI JAWA BARAT.....	121
	7.2	LATAR BELAKANG DAN TEORI PENYAKAPAN.....	147
	7.3	PENYAKAPAN TIDAK SELALU INEFISIEN.....	165
BAB VIII		PEMBANGUNAN SUMBERDAYA ALAM PERTANIAN [<i>NATURAL CAPITAL</i>]	175
	8.1	KELAYAKAN PEMENUHAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN.....	177
	8.2	UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI MELALUI OPTIMASI SUMBERDAYA LAHAN PADA KONDISI KETERBATASAN FASILITAS IRIGASI.....	185 *
	8.3	POTENSI EKONOMI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN GARUT.....	197
BAB IX		PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PERTANIAN [<i>INSTITUTIONAL CAPITAL</i>]	213

- 9.1 LEMBAGA REGULATOR UNTUK KOMODITAS PERTANIAN STRATEGIS PADA SISTEM PANGAN NASIONAL (FOOD NATIONAL SYSTEM) DALAM RANGKA Mendukung KETAHANAN PANGAN NASIONAL..... 215
- 9.2 ASURANSI SEBAGAI WAHANA MEMPEROLEH KEPASTIAN DALAM PENGEMBANGAN KOMODITI PERTANIAN..... 225
- 9.3 PERANAN ORGANISAS PETANI DALAM MENUNJANG REVITALISASI PERTANIAN..... 231
- 9.4 PEMBAHARUAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA BERBASIS LOKALITAS DAN KEMITRAAN..... 237
- 9.5 TANGGAPAN ATAS SALAH SATU SISI RUU PANGAN..... 241
- 9.6 PENINGKATAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSI MELALUI PASAR LELANG LOKAL (PLL) 251
- 9.7 ASPEK KELEMBAGAAN DALAM OTONOMI PERGURUAN TINGGI..... 255
- 9.8 PENINGKATAN AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI JAWA BARAT MELALUI *CORPORATE FARMING-EQUITABLE* BAGI MASYARAKAT PETANI SEKITAR HUTAN..... 259

BAB X PEMBANGUNAN POLITIK [*POLICY CAPITAL*] PERTANIAN..... 273

- 10.1 PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PERTANIAN NASIONAL DAN SARAN IMPLEMENTASI PROGRAM REVITALISASI PERTANIAN DI DAERAH OTONOM..... 275
- 10.2 INSENTIF BAGI PETANI PADI DALAM MEMANFAATKAN LAHAN SUB OPTIMAL (LSO) UNTUK Mendukung KETERSEDIAAN PANGAN..... 291

10.3	MENGANGKAT POSISI TAWAR PETANI PADI DI JAWA BARAT.....	301
BAB XI	PEMBANGUNAN LINGKUNGAN [<i>ECOLOGY CAPITAL</i>] PERTANIAN.....	317
11.1	MENUJU PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN EKONOMI PERDESAAN BERKELANJUTAN.....	319
11.2	PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN.....	335
11.3	PERTANIAN PERKOTAAN (<i>URBAN FARMING</i>) DI KOTA BANDUNG.....	339
BAB XII	MEMBANGUN KEDAULATAN PERTANIAN.....	345
	DAFTAR PUSTAKA.....	361
	BIOGRAFI PENULIS.....	382

8.2

UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI MELALUI OPTIMASI SUMBERDAYA LAHAN PADA KONDISI KETERBATASAN FASILITAS IRIGASI¹⁸

—Untuk mewujudkan pengelolaan irigasi yang adil dan berkelanjutan, maka perlu ada insentif bagi P3A Mitra Cai yang berkontribusi lebih banyak untuk menjamin ketahanan pangan melalui gerakan hemat air, hemat input dan ramah lingkungan, yang dinilai berdasarkan Indeks kinerjanya—

Berbicara mengenai nasib petani di Indonesia memang tidak ada habisnya. Suatu yang sangat ironi, bahwa disatu sisi petani sangat berjasa dalam membawa Indonesia swa-sembada beras pada tahun 1998, bahkan sekarangpun dituntut berjuang untuk mencapai target surplus 100 juta ton pada tahun 2014. Namun di sisi yang lain, kesejahteraannya kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Kajian Sadikin (2009), berdasarkan kinerja indeks nilai tukar pendapatan petani (NTPP) di sentra produksi padi di Jawa Barat mencapai 1,00 sampai 1,20, sedangkan indeks nilai tukar petani (NTP) antara 86,94 sampai 100,60. Nilai tukar petani (NTP) didefinisikan sebagai rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), oleh karena itu NTP dapat dipakai sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani. Dari hasil NTP yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan petani padi termasuk relatif kurang baik (rendah).

Di tingkat mikro, pendapatan petani yang rendah itu diperberat lagi dengan kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian yang sempit. Rata-rata luasan lahan usaha yang < 0,5 hektar, akan sulit memenuhi skala ekonomis,

¹⁸ Tulisan ini merupakan kontribusi dari **Dr. Lies Sulistyowati, Ir., MS.** Dosen Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Unpad

**Dalam konteks kekinian,
kedaulatan pertanian menjadi
penting, menjadi
keharusan untuk diwujudkan di
Indonesia. Persoalannya, hampir
semua sisi
pertanian [pangan, perkebunan,
peternakan], perikanan dan
kehutanan
berada pada kondisi yang tidak
berdaulat. Tentu diperlukan
kecermatan dan
ketajaman dalam menganalisis
ketidakberdaulatan tersebut.
Analisis yang
bukan sekedar tersedia atau**



**Laboratorium Pembangunan Pertanian
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian UNPAD**

Gedung Sosek It.2 Fakultas Pertanian
Universitas Padjadjaran
Jl. Ir. Soekarno Km. 21
Telp/Fax : 022 7796318